

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank Indonesia (BI) menginisiasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan tujuan menginstaurasi sistem pembayaran yang secure, efisien, dan seamless. Inisiatif ini bertujuan mendorong kinerja sistem keuangan nasional agar dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. GNNT juga diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam transaksi tunai, seperti risiko uang fisik yang tidak dapat diterima karena keadaan lusuh, sobek, atau tidak layak edar, dan sekaligus meningkatkan efisiensi pada saat transaksi tanpa memerlukan pembawaan uang dalam jumlah besar oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat ditingkatkan keakuratan transaksi dengan menghindari potensi kesalahan perhitungan atau human error. Secara keseluruhan, GNNT diharapkan dapat membentuk ekosistem masyarakat tanpa uang tunai.

Tujuan utama dari gerakan Non Tunai Indonesia adalah untuk mengurangi transaksi yang menggunakan uang tunai, yang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kejahatan dan pencucian uang. Gerakan ini juga untuk meningkatkan literasi keuangan dan teknologi, serta menciptakan ekonomi digital yang inklusif agar memudahkan akses ke produk dan layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia.¹ Dengan meningkatnya penerapan teknologi pembayaran digital, diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengatasi

¹ Bank Indonesia, “*Apa itu Keuangan Inklusif*”, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>, diakses 23 Februari 2023

masalah yang terkait dengan transaksi uang tunai, seperti kemungkinan pencucian uang dan kriminalitas.²

Gerakan ini juga bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan pembayaran digital. Dengan meningkatnya penerapan teknologi pembayaran digital di Indonesia, diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi yang dibebankan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi. Transaksi non tunai juga adalah komitmen yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 – 2017.

Belanja Non Tunai di Indonesia masih terdapat masalah yaitu Infrastruktur yang kurang memadai dalam hal perkembangan teknologi dan akses internet, Edukasi dan Kesadaran yang masih minim dan belum sepenuhnya memahami manfaat dan cara menggunakan metode pembayaran Non Tunai. Keamanan merupakan masalah penting dalam belanja nontunai. Meskipun ada banyak langkah yang diambil untuk melindungi transaksi, seperti penggunaan chip dan PIN, verifikasi dua faktor, dan enkripsi data, tetap ada risiko penipuan dan pencurian data yang perlu diwaspadai, Keterbatasan akses ke rekening bank dan kartu kredit yang diperlukan untuk menggunakan pembayaran Non Tunai, serta perbedaan preferensi pembayaran masyarakat indonesia yang masih banyak dipilih oleh

² Bank Indonesia, “*Apa Itu Elektronifikasi?*”. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx#floating-3>. diakses pada 23 Februari 2023

masyarakat indonesia yang menghambat untuk mengadopsi pembayaran Non Tunai secara luas.³

Untuk pemerintah daerah juga diatur dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dipertegas pula dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2017, Kota Jambi menonjol sebagai wilayah paling progresif di Provinsi Jambi dalam mengadopsi transaksi non tunai, yang saat itu mencapai tingkat penetrasi sebesar 98%. Penggunaan metode ini melibatkan pembayaran gaji dan tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pegawai kontrak, mencapai angka yang mengesankan. Bahkan, untuk pembayaran kepada pihak ketiga, tingkat adopsi telah mencapai 100%.

Inisiatif yang dicanangkan oleh Wali Kota Jambi, H. Syarif Fasha, untuk mendorong Bank Jambi menerapkan layanan mobile banking dan transaksi non tunai dalam aktivitas keuangan ASN di Pemerintah Kota Jambi akhirnya diresmikan dengan peluncuran resmi di Kota Jambi. Layanan baru yang diintegrasikan oleh Bank Jambi dalam aplikasi mobile banking tidak hanya memfasilitasi transaksi keuangan ASN Pemkot Jambi, tetapi juga mencakup pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online. Dengan adanya

³ Otoritas Jasa Keuangan, “*Alat Pembayaran Makin Berkembang, Transaksi Makin Mudah, Makin Bijak Mengelolanya*”
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20533>, diakses 19 Juni 2023

inovasi ini, warga Kota Jambi tidak lagi perlu menghadapi antrian untuk melakukan pembayaran PBB, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Selain itu juga dilakukan pencaangan implementasi transaksi non tunai pada Pemkot Jambi. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu cek bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.⁴

Pada tahun 2020 BPK-RI Perwakilan Jambi menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) temuan BPK-RI Perwakilan Jambi tahun 2019 yang menegaskan, Pertanggungjawaban Biaya BBM pada Tiga Perangkat Daerah Tidak didukung bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp.430.874.765,00. Oleh karena itu, BPK-RI merekomendasikan Walikota Jambi agar memerintahkan Sekretariat Daerah, Kepala Satpol PP, dan Kepala Dinas PUPR selaku PA agar meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawaban biaya BBM dan memerintahkan PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah, Satpol PP dan Dinas PUPR agar mengajukan Pembayaran BBM dengan Mekanisme LS dan lebih cermat meneliti keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti pembelian BBM.⁵ Dengan demikian pembayaran seharusnya dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dalam bentuk perjanjian Kerjasama

⁴ Viral Jambi, "Apresiasi Walikota, Bank Jambi Beri Piagam Penghargaan" <https://jambi.viralpublik.com/index.php/apresiasi-walikota-bank-jambi-beri-piagam-penghargaan>. Diakses 11 september 2023

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan-RI Perwakilan Provinsi Jambi, "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2019", Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi TA 2019 No 24.C/LHP/XVIII.JMB/6/2020. Tanggal 30 Juni 2020.

antara Pemerintah kepada penyedia BBM (SPBU-red). Oleh karenanya, Pemerintah Kota Jambi menerapkan mekanisme pembayaran BBM ke penyedia langsung sementara kepada pengguna kendaraan diberikan kupon/voucher atau *cashless*.

Menurut hasil wawancara dari salah satu PNS yang menerima kupon BBM,

“Untuk masalah jalannya kebijakan kupon BBM tidak ada, tetapi untuk menukar kupon BBM di SPBU Broni harus sesuai jadwal yang ditentukan dikarenakan stok BBM di SPBU bronni tidak memenuhi jika semua dinas di Kota Jambi menukar kupon BBM secara bersamaan”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan belanja non tunai dengan menggunakan voucher BBM.⁶

Menurut hasil wawancara dari salah satu pegawai SPBU yang menjadi penyedia BBM, “Penukaran kupon BBM terkadang tidak sesuai dengan nopol kendaraan yang ditukarkan”⁷

Hal itu dapat menyebabkan penukaran kupon BBM jadi tidak tepat sasaran.

Dari hasil survey Pemerintah Kota Jambi kepada penyedia BBM, yakni dari sebanyak 24 SPBU dalam Kota Jambi, hanya ada empat SPBU yang bersedia bekerjasama dengan Pemkot Jambi tanpa menggunakan deposit awal atau cash yaitu SPBU 24.361.06; SPBU 24.361.55; SPBU 24.376.79; SPBU 24.361.83.

Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh M. A. Tadjuka¹, A. I. Jaya, dan R. Ratianingsih dalam jurnal yang berjudul “ Rancang Bangun Aplikasi Pengontrolan Kupon Bbm Kendaraan Dinas Dan Pelaporan Konsumsinya Dengan

⁶ Pemerintah Kota Jambi, *Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*, Perda Kota Jambi No.14 Tahun 2016, Ps. 2.

⁷ Wawancara dengan pegawai SPBU, tanggal 30 juni 2023 di SPBU Broni Kota Jambi

Sms Gateway Berbasis Barcode” yang mana jurnal ini meneliti dan menawarkan suatu rancang bangun aplikasi SMS Gateway berbasis barcode untuk pengontrolan konsumsi BBM dan pelaporan konsumsi kendaraan dinas dari instansi Universitas Tadulako, Dinas Kebersihan Kota Palu dan POLSEK Palu Timur. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aplikasi pengendalian alokasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kendaraan dinas melalui SMS Gateway berbasis barcode, yang mencakup informasi mengenai sisa kuota pemakaian BBM per kendaraan dinas, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah berhasil dikembangkan Aplikasi SMS Gateway berbasis barcode. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mengontrol konsumsi BBM pada kendaraan dinas dan menyajikan laporan konsumsinya. Tabulasi besar sisa kuota BBM per kendaraan dinas pada setiap instansi terkait per bulan didasarkan pada pengumpulan data melalui rekapitulasi setiap transaksi SMS. Informasi mengenai sisa kuota bulan berjalan dihitung dengan mengurangi jumlah pemakaian kuota dari kuota awal, dan hasil tabulasi ini dikirimkan secara langsung kepada instansi terkait untuk setiap kendaraan dinas di setiap instansi.⁸

Dan yang kedua penelitian ini dilakukan oleh Max ABR S Lenggu, Yanuar Dally dalam jurnal yang berjudul “Pengembangan Aplikasi E-Voucher Dalam Rangka Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar Minyak Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang” yang mana jurnal ini melakukan penelitian dan pengembangan suatu Aplikasi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM), khusus untuk kendaraan dinas di

⁸ M. A. Tadjuka1, A. I. Jaya, dan R. Rationingsih, “Rancang Bangun Aplikasi Pengontrolan Kupon Bbm Kendaraan Dinas Dan Pelaporan Konsumsinya Dengan Sms Gateway Berbasis Barcode”, (Jurnal Ilmiah Matematika dan Terapan) Vol 16 Nomor 2 Desember 2019, Hlm 185–197. Diakses 19 Juni 2023.

lingkup Kota Kupang. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dashboard aplikasi yang dikenal sebagai Si-Hebat BBM akan ditempatkan di Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang. Si-Hebat BBM dikembangkan untuk mengurangi kemungkinan penyelewengan penggunaan kupon BBM yang saat ini masih didistribusikan secara manual kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengembangan aplikasi Si-Hebat ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Kupang dalam mengatasi permasalahan penggunaan BBM dengan lebih efisien dan tepat sasaran, sambil mengendalikannya secara digital. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi risiko penyalahgunaan penggunaan BBM, tetapi juga untuk meminimalisir pemborosan anggaran yang lebih lanjut. Aplikasi Si-Hebat BBM akan menghasilkan QR Code yang mencakup identitas kendaraan dinas. QR Code ini kemudian akan ditempelkan pada setiap kendaraan dinas. Ketika kendaraan dinas memasuki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), petugas akan melakukan pemindaian QR Code yang terhubung secara online ke Bagian Keuangan. Dengan demikian, data pengisian dapat terkontrol secara waktu nyata.⁹

Dan yang ketiga penelitian ini dilakukan Lia Apriani dalam skripsi yang berjudul “Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Tujuan Pengendalian Internal Penjualan Voucher BBM (Uang Muka) Pada Puteramas Grup Bandung” yang mana skripsi ini melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan audit internal atas penjualan telah terlaksana secara memadai ; pengendalian internal atas

⁹ Max ABR S Lenggu, Yanuar Dally, “*Pengembangan Aplikasi E-Voucher Dalam Rangka Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar Minyak Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang*” (Jurnal Inovasi Kebijakan) Vol VI, Nomor 1, 2021 hlm 39-54. Di akses 19 Juni 2023

penjualan telah dilaksanakan secara efektif; dan peranan audit internal dalam menunjang tujuan pengendalian internal penjualan voucher BBM pada Puteramas Grup Kota Bandung. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya korelasi sebesar 0,885 antara audit internal dan peranan pengendalian internal penjualan di Puteramas Grup Kota Bandung. Hal ini menyiratkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut sangat erat. Dengan kata lain, audit internal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan pengendalian internal penjualan di Puteramas Grup Kota Bandung sebesar 78,3%, sementara 21,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.¹⁰

Fokus penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi belanja nontunai kupon bbm dalam rangka menghindari penyalahgunaan bahan bakar minyak di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Implementasi kebijakan belanja nontunai dalam konteks kajian ini adalah bagaimana jalannya kebijakan belanja nontunai kupon bbm ini sebagai sebuah gerakan yang dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan transparan. Selain itu penelitian ini juga mengurai komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pemerintah Kota Jambi.

Terdapat perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang pengembangan aplikasi voucher bbm yang dimana tidak membahas implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat. Penelitian saya akan membahas tentang implementasi kebijakan belanja

¹⁰ Lia Apriani, Skripsi: “*Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Tujuan Pengendalian Internal Penjualan Voucher BBM (Uang Muka) Pada Puteramas Grup Bandung*” (Bandung: Universitas Sangga Buana YPKP,2020) Hlm 4

nontunai kupon bbm dalam rangka menghindari penyalahgunaan bahan bakar minyak di lingkungan pemerintah Kota Jambi.

Berangkat dari adanya kebijakan belanja non tunai tersebut maka saya akan memfokuskan penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Belanja Non tunai Kupon BBM dalam Rangka Menghindari Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Dengan menggunakan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan belanja non tunai kupon BBM dalam rangka menghindari penyalahgunaan bahan bakar minyak di lingkungan pemerintah Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Belanja Non Tunai Kupon BBM Dalam Rangka Menghindari Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi para mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Analisa Implementasi Kebijakan Belanja Non Tunai Kupon BBM Dalam Rangka Menghindari Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Dinas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau menjadi bahan masukan guna pengimplementasian Kebijakan Belanja Non Tunai Kupon BBM di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar lebih efektif dan efisien.
- b. Bagi Aparatur Pemerintah, penelitian ini mampu memberikan informasi pada aparatur pemerintah kota Jambi dalam melaksanakan kebijakan Belanja Non Tunai Kupon BBM serta dapat bertanggung jawab dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang berlaku bagi instansi tersebut hingga mampu memberikan hasil yang efektif dan efisien untuk instansi terkait.
- c. Bagi penyusun, untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penyusun terutama dalam meningkatkan analisis implementasi kebijakan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini umumnya terkait dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering diidentifikasi sebagai suatu proses di mana rangkaian kegiatan akan dijalankan setelah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan, melibatkan pengambilan keputusan.

Dalam konteks kebijakan, implementasi berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh distorsi dalam pelaksanaan kebijakan, yang merupakan isu penting bagi para pelaksana (implementor) yang berusaha mengatasinya. Harapannya adalah agar desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses, sehingga mencapai hasil yang diinginkan.¹¹

Secara etimologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang terkait dengan menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan sarana tertentu untuk mencapai hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah proses interaksi antara penetapan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, esensi dari suatu implementasi terletak pada "pembangunan

¹¹ Schnider, Goggin, and Ingram, Malcolm L, *Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation*. (USA: Scott, Foresman and Company, 2017).

hubungan" dan rangkaian tindakan, sehingga kebijakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuannya.¹²

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Setelah membahas mengenai konsep implementasi kebijakan publik maka pada bagian selanjutnya diuraikan model-model implementasi kebijakan publik yang diperkenalkan oleh: Model teori Edward III.

b. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab "implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*)".¹³ Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab, memfokuskan diri pada "sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut".¹⁴ Dari sudut pandang implementor, menurut

¹² Nawi, Rusdin, *Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia*. (Jurnal Universitas Satria Makassar, 2018). hlm 1-9. Diakses 30 Januari 2023.

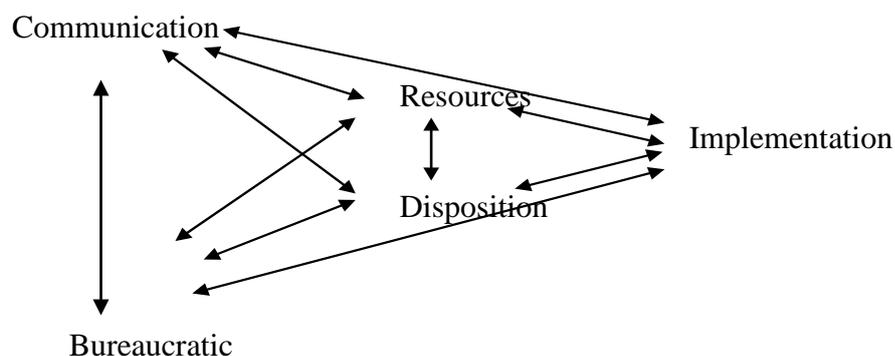
¹³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta; Bumi Aksara, 2005) Hlm 63

¹⁴ Ibid. hlm 63

Wahab, implementasi akan terfokus pada “tidakkan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”.¹⁵ Sementara dari sudut pandang target groups, menurut Wahab, implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.¹⁶

Menurut George Edward III dalam Widodo terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.¹⁷

Gambar 1.1 Faktor penentu Keberhasilan Implementasi Menurut Edward III



¹⁵ Ibid. hlm 64

¹⁶ Ibid. hlm 64

¹⁷ Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. (Malang: Bayu Media. 2010) Hlm 96

1) Komunikasi

Efektivitas dan efisiensi implementasi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, terutama kejelasan dan pemahaman mengenai ukuran serta tujuan kebijakan oleh individu yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan ukuran dan tujuan kebijakan secara tepat kepada para pelaksana. Komunikasi yang jelas dan tepat tentang ukuran dan tujuan kebijakan menjadi kunci agar implementor dapat memahami dengan baik, sehingga menciptakan keseragaman dan konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan. Melalui komunikasi yang baik, para pelaksana dapat memahami dengan tepat bagaimana mengukur dan mencapai tujuan kebijakan, memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai harapan.

Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Individu seringkali menggunakan atau menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Di samping itu, adanya variasi dalam informasi juga dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, diperlukan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, dan individu yang terlibat harus memahami apakah mereka mampu melaksanakannya.

Dalam konteks implementasi kebijakan, penting bahwa kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh semua pihak dan personel terkait. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memahami dengan jelas dan akurat maksud

serta tujuan dari kebijakan tersebut. Jika terdapat ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan, terutama yang terlihat oleh aktor pembuat kebijakan, maka pemahaman mengenai arah yang diinginkan menjadi kurang jelas. Para implementor kebijakan kemungkinan akan merasa bingung terhadap langkah-langkah yang harus diambil, dan memaksakan kebijakan tanpa pemahaman yang memadai dapat mengakibatkan hasil yang tidak efektif dan optimal.

Ketidakjelasan dan kurangnya komunikasi serius kepada para implementor dapat memberikan dampak negatif pada proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami secara menyeluruh mengenai maksud, tujuan, dan spesifikasi kebijakan yang akan diimplementasikan. Ini dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka, jelas, dan sistematis kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

2) Sumber daya

Komponen sumberdaya dalam konteks ini mencakup beberapa aspek krusial, melibatkan jumlah staf, keahlian para pelaksana atau staf, informasi yang jelas dan relevan untuk mendukung implementasi kebijakan, pemenuhan sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan program, serta kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sesuai dengan harapan. Selain itu, pentingnya adanya fasilitas pendukung yang dapat digunakan dalam kegiatan program, termasuk ketersediaan dana dan sarana prasarana.

Dengan memastikan adanya jumlah staf yang memadai, keahlian yang diperlukan, informasi yang tepat, dan pemenuhan sumber daya yang relevan, pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara lebih efektif. Kewenangan yang jelas juga merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa program dapat diarahkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti dana dan sarana prasarana turut berperan penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Bukan suatu masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi program dan akuratnya komunikasi yang dikirim, apabila personel yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan program mengalami kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya, maka Sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Dengan demikian, Jika jumlah personil pelaksana kebijakan terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan. Kurangnya kemampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan skill yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik tentang kelistrikan.

Informasi merupakan bagian sumber daya yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang terkait bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksanaan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. bukti dilapangan menunjukkan bahwa tingkat pusat kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti para oknum pelaksana tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kemudian pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan masalah baru. Implementasi kebijakan membutuhkan ketaatan organisasi dan individu pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu, Sumber daya yang dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk mengatur/membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan kantor, serta dana yang mencukupi tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3) Sikap (Disposisi)

Faktor kunci yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap dari para implementor. Kesesuaian pandangan implementor dengan isi kebijakan dapat mempengaruhi proses implementasi secara

signifikan. Jika implementor sepakat dengan isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusias. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan pandangan antara implementor dan pembuat kebijakan, proses implementasi dapat mengalami hambatan dan menimbulkan masalah. Sikap implementor terhadap kebijakan dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu kesadaran terhadap kebijakan, petunjuk pelaksanaan untuk merespon program, serta intensitas dari respon tersebut.

Implementor mungkin memahami tujuan program, namun, terkadang tujuan tersebut tidak tercapai dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya, yang menyebabkan mereka mengalihkan atau menghindari implementasi program tersebut. Dukungan dari pejabat pelaksana juga sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Dukungan ini dapat ditunjukkan dengan menetapkan kebijakan sebagai prioritas program, menempatkan pelaksana yang mendukung program, serta memperhatikan keseimbangan aspek demografi seperti daerah, agama, jenis kelamin, suku, dan lainnya.

Selain itu, indikator dukungan ini mencakup alokasi dana yang memadai untuk memberikan insentif kepada para pelaksana program, sehingga mereka dapat mendukung dan berkomitmen sepenuhnya dalam melaksanakan kebijakan atau program tersebut. Dengan demikian, dukungan yang kuat dari pimpinan dapat memiliki dampak positif terhadap implementasi kebijakan dan membantu mencapai tujuan secara efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- b) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)

Tingkat komunikasi “terbuka” yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.

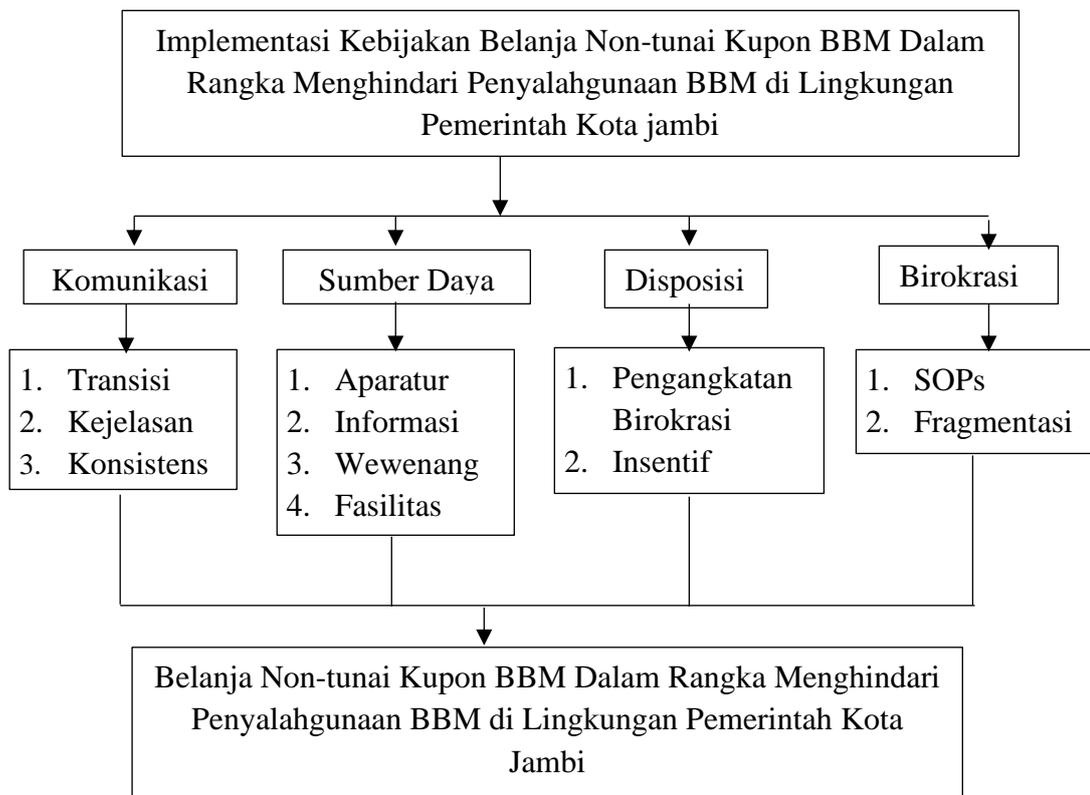
- d) Vitalitas suatu organisasi
- e) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal ketika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan

kerjasama banyak pihak, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implemetasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

1.6 Kerangka Pikir

Untuk mempermudah penulis dalam rangka menyusun juga menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini, maka perlu diperlukan suatu kerangka pikir yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

Berikut ini kerangka pikir pada penelitian ini.



Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin Implementasi Kebijakan Belanja Non-tunai Kupon BBM Dalam Rangka Menghindari Penyalahgunaan BBM di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Yang mana akan dibahas menggunakan teori George C. Edward III untuk mengetahui implementasi kebijakan Belanja Non-tunai Kupon BBM Dalam Rangka Menghindari Penyalahgunaan BBM di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Dengan menggunakan 4 Indikator Implementasi tersebut di dalam penelitian ini, akan dapat

diketahui Implementasi Kebijakan Belanja Non-tunai Kupon BBM dalam Rangka Menghindari Penyalahgunaan BBM di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti. Jenis deskriptif ini bertujuan membuat deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek-objek tertentu.¹⁸

Metode ini menggunakan metode pendekatan fenomenologi yang dimana studi fenomenologis ini menggambarkan makna bagi beberapa individu mengenai pengalaman bersama mereka tentang sebuah konsep atau fenomena yang berfokus pada persepsi masyarakat tentang dunia atau persepsi tentang hal-hal yang muncul dalam diri mereka.

Penelitian fenomenologis mencari jawaban atas pertanyaan penelitian secara deskriptif melalui wawancara atau pengamatan yang paling dekat dengan fenomena tersebut, sedangkan penelitiannya akan mengidentifikasi fenomena sebagai 'objek' pengalaman manusia dan memberikan suara untuk itu.¹⁹

¹⁸ Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 17

¹⁹ Creswell, J. W. *Five Qualitative Approaches to inquiry*. In. J. W. Creswell, *Qualitative Inquiry, and research Design: Choosing among five Approaches*. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2007) hlm. 57-62

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi dan waktu yang tepat sangatlah penting dalam melakukan penelitian yang sangat mendalam agar mendapatkan data yang terpercaya dan apa adanya untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor OPD Pemerintah Kota Jambi di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penelitian ini berfokus untuk Implementasi Kebijakan Belanja Non-tunai Kupon BBM dalam Rangka Menghindari Penyalahgunaan BBM di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini

1. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan

sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi, jurnal dan buku.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Teknik purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini dapat berupa keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu, di mana orang yang dipilih dianggap paling memahami atau mengetahui informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, pertimbangan bisa juga berkaitan dengan posisi atau peran tertentu, seperti menjadi penguasa atau memiliki kekuasaan yang memungkinkan peneliti untuk lebih mudah menjelajahi objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling relevan dan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap penelitian.²⁰

Peneliti menggunakan purposive sampling bertujuan untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Berdasarkan teknik purposive sampling yang peneliti gunakan, Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁰ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.*(Bandung: Alfabeta.2011)
hlm 145

1. Sekretaris BPKAD
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala SPBU

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²¹ Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan menjadi partisipan secara langsung dan sistematis terhadap obyek yang diteliti

Penulis mengobservasi lokasi SPBU dan kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Jambi dengan mendatangi langsung untuk mencari tahu tentang situasi yang ada di tempat objek penelitian serta memahami keadaan dan mengumpulkan data-data yang terjadi di lapangan.

Di dalam penelitian, jenis teknik observasi yang lazim digunakan untuk alat pengumpulan data:

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) hal. 220

1) Observasi partisipan

Yang dimaksud observasi partisipan ialah apabila observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi. Apabila observasi partisipan tetapi jika unsur partisipan sama sekali ada pada observer dalam kegiatannya maka disebut observasi non partisipan.

2) Observasi sistematis

Ciri pokok observasi sistematis adalah adanya kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorinya, karenanya sering disebut observasi berkerangka/observasi berstruktur.

3) Observasi eksperimental

Observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan di mana ada observer mengadakan pengendalian unsur-unsur penting dalam situasi sedemikian rupa sehingga situasi itu dapat diatur sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat dikendalikan untuk menghindari atau mengurangi timbulnya faktor-faktor yang secara tak diharapkan mempengaruhi situasi itu.²²

2. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴ Dalam hal ini, pewawancara harus memiliki konsep yang jelas mengenai hal yang dibutuhkan kerangka tertulis. Daftar pertanyaan

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-11 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 72

²³ *Ibid.*, hal. 72

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, hal. 186

harus tertuang dalam rencana wawancara untuk mencegah kemungkinan mengalami kegagalan memperoleh data.

Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Lexy Moleong, membagi wawancara kedalam beberapa jenis, yaitu:

a) Wawancara oleh tim atau panel

Wawancara oleh tim berarti wawancara yang dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi oleh dua orang atau lebih terhadap seorang yang diwawancarai.²⁵

b) Wawancara riwayat secara lisan

Jenis ini adalah wawancara terhadap orang-orang yang pernah membuat sejarah atau yang membuat karya ilmiah besar, sosial, pembangunan, perdamaian, dan sebagainya.²⁶ Maksud wawancara ini adalah untuk mengungkapkan riwayat hidup, pekerjaan, kesenangan, ketekunan, pergaulan orang yang diwawancara, dan lain-lain.

c) Wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur

Dalam point ini, dijelaskan bahwa ada wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Menurut Lexy Moleong dalam tulisannya mengatakan bahwa:

“Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan wawancara

²⁵Ibid., hal. 188

²⁶ Ibid., hal. 189

terstruktur. Wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.”²⁷

Wawancara dilakukan dengan menggunakan petunjuk umum wawancara (pedoman wawancara) secara terstruktur.²⁸ Maksudnya adalah peneliti menetapkan pertanyaan-pertanyaan sendiri yang akan diajukan kepada subjek penelitian secara ketat dan rapi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang riil dan akurat dari subjek penelitian. Meskipun demikian, peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan pada aspek-aspek lain yang mendukung terhadap topik penelitian.

Dalam melakukan wawancara, dibutuhkan suatu pelaksanaan. Lincoln dan Guba dalam Sanapiah Faisal mengemukakan bahwa ada tujuh penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara.
4. Melangsungkan alur wawancara.
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.

²⁷ Ibid., hal 190

²⁸ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2008). hal. 190

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.²⁹

Pada tahap berikutnya penulis mengumpulkan informasi dengan memberikan pertanyaan dan terwawancara menjawab atas pertanyaan pewawancara dan melalui rekaman suara dengan pihak SPBU dan PNS Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Jambi agar memudahkan dalam mengumpulkan data-data baik primer ataupun sekunder.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Menurut Gottschalk yang dikutip oleh Imam Gunawan menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar atau arkeologis.³⁰ Selanjutnya, Suguyono dalam tulisannya, mengatakan bahwa,

“Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.”

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-7(Bandung: Alfabeta,2012), hal. 76

³⁰ 22 Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 175

Dokumentasi ini akan peneliti gunakan untuk memperkuat dalam memperoleh data selain menggunakan teknik observasi dan wawancara. Peneliti berharap, dengan menggunakan dokumentasi, peneliti akan menemukan data yang lebih akurat serta bisa dipertanggungjawabkan di dalam penulisan laporan penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif ada 4 alur Kegiatan yang terdapat secara bersamaan meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagi dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, serta menghilangkan data yang tidak mesti di ambil, supaya kesimpulan terakhir bisa di ambil dan diverifikasi. Reduksi data bisa dilakukan selama penelitian berlangsung, sampai laporan tersusun.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dengan jelas agar mudah dibaca. Sajian data penulis berasal dari hasil observasi dan wawancara yang sudah direduksi kemudian disusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan cara memeriksa, mengatur serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Berbagai informasi yang teratur memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian pada suatu kegiatan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Pada penelitian kualitatif, prinsip pokok teknik analisisnya adalah menganalisa dan mengolah data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, bermakna, serta terstruktur³¹

1.7.8 Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 231.

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman penulis baik mengenai konflik yang diteliti maupun konteks dimana konflik itu muncul.

Dalam penelitian ini, terdapat dua triangulasi data diantaranya:

1. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
3. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.